

INTERVENSI NEGARA DAN PENDEKATAN PRO PASAR DALAM PEMBANGUNAN : SEBUAH ANALISIS KRITIS TERHADAP TESIS BANK DUNIA¹

Dyah Estu Kurniawati²

Abstract

This article explore about the lesson from Japan, South Korea and Taiwan experiences as the countries, based on the World Bank Thesis, going to be a successful development model but actually they are not neutral, state does not take pro-market approach for development. They do not practice a integration with the world economy on their fasting growth. State playing important roles and followed by effective industrial policy. The government dose not replace the market fully like Soviet Union, but does not following the market. The weakness of World bank thesis of pro-market approach is less attention to the idea that government have the different capacity to make sure the market mechanism.

Keywords : market, industrialization, economy development

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pelajaran yang digambarkan dari pengalaman Jepang, Korea Selatan dan Taiwan – negara-negara yang menurut Tesis Bank Dunia dijadikan sebagai model pembangunan yang sukses – bahwa ternyata mereka tidak netral, negara tidak melakukan pendekatan yang pro-pasar untuk pembangunan. Ketiga negara tersebut juga tidak mempraktikkan sebuah integrasi yang menyatu dengan ekonomi dunia selama periode pertumbuhan cepat mereka. Negara memainkan peran yang besar dan mengikuti kebijakan industri yang sangat aktif. Pemerintah tidak menggantikan pasar secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Uni Soviet, tidak juga hanya mengikuti pasar. Kelemahan yang mendasar dari pendekatan pro-pasar dari Tesis Bank Dunia, yang termasuk dalam ekonomi pembangunan neo-klasik, adalah kurangnya perhatian terhadap gagasan bahwa pemerintah mempunyai perbedaan *kapasitas* dalam menuntun jalannya mekanisme pasar.

Kata Kunci : Pasar, Industrialisasi, Pembangunan Ekonomi

¹ Sumber: *State Intervention and the ‘Market-Friendly’ Approach to Development: A Critical Analysis of the World Bank Theses* by Ajit Singh.

² Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Pendekatan Pro-Pasar dari Tesis Bank Dunia

Tesis Bank Dunia yang terangkum dalam *the World Development Report* 1991, dimulai dengan mempertanyakan peran negara dalam mengintervensi kegiatan ekonomi. Isu sentral dalam pembangunan adalah interaksi antara pemerintah dan pasar, dan ini bukan tentang intervensi melawan *laissez faire* – dikotomi yang populer tetapi salah. Pasar yang kompetitif masih merupakan cara yang terbaik dan efisien untuk mengatur distribusi barang maupun jasa. Tetapi pasar tidak dapat beroperasi dalam negara yang vakum, pasar membutuhkan sebuah hukum dan pengatur *frame work* yang hanya bisa dibuat oleh negara. Tidak jarang pula terjadi kegagalan pasar. Oleh karenanya negara masih memiliki peran, misalnya investasi dibidang infrastruktur dan menyediakan pelayanan social pada kaum miskin. Intinya ini bukan masalah mana yang menjadi pekerjaan negara atau pasar, tetapi masing-masing memiliki peran yang besar dan tidak dapat tergantikan.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa sebenarnya yang disebut peran yang besar dan tidak dapat tergantikan dari negara (pemerintah)? Tesis Bank Dunia menegaskan bahwa dari teori ekonomi³ dan pengalaman praktis menunjukkan bahwa peran penting pemerintah adalah memfasilitasi beroperasinya pasar melalui intervensi yang "non-selektif" (pro pasar), misalnya dengan melakukan investasi dalam infrastruktur fisik dan social, fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan dengan menyiapkan iklim yang sesuai bagi kegiatan bisnis swasta. Fungsi lain dari pemerintah dalam konsep ini adalah mempromosikan kompetisi domestik dan internasional dengan tujuan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara efisien. Ini hanya mungkin apabila pemerintah menetapkan system kebijakan yang netral.⁴ Untuk menghindari pengulangan kata dalam analisis tanpa merubah kejelasan makna secara signifikan, maka Tesis Bank menjelaskan konsep *market-friendly* sebagai berikut:

- *Intervene reluctantly*, memberikan kesempatan kepada pasar untuk bekerja kecuali jika terjadi kegagalan pasar.
- *Apply check and balance*. Melakukan intervensi secara kontinyu demi ketertiban pasar domestik dan internasional, sebagai penyeimbang.
- *Intervene openly*, melakukan intervensi secara terbuka, transparan dan tunduk pada aturan daripada menurut kehendak sendiri.

Basis pendekatan metodologis *The World Development Report* 1991, adalah menggambarkan analisis dan *lesson* kebijakan dengan membandingkan pengalaman kesuksesan dan ketidaksuksesan pembangunan ekonomi di berbagai negara selama empat decade terakhir. Kesuksesan ekonomi Asia Timur memainkan peran yang sangat penting dalam analisis tesis. Secara spesifik Tesis Bank Dunia menggambarkan ekonomi Jepang di akhir tahun 1940-an dan kemajuan yang sangat luar biasa sejak itu. Kemajuan ini dapat terjadi meskipun negara tersebut telah mengalami kegagalan sebelumnya. Pengalaman Jepang selama Perang Dunia II sangatlah relevan untuk negara yang sedang membangun, utamanya ekonomi negara semi industri. Awal 1950-an, Jepang memproduksi baja lebih sedikit (sekitar 5 juta ton) dan mobil lebih sedikit (sekitar 50.000) dibandingkan Brazil, India dan Mexico saat itu dan sebagai eksporter produk-produk dengan pasar yang luas. Produk baja tahunan AS saat itu sekitar 100 juta ton dan industri mobil AS memproduksi sekitar 6 juta mobil pertahun. Kurang dari dua decade kemudian, Jepang memproduksi baja dan mobil melebihi produksi AS. Pekerja-pekerja Jepang, mulanya diupah dengan standar Asia di tahun 1950-an, kemudian bisa menyamai

³ Teori Ekonomi Neo-Klasik

⁴ Mohtar Mas' oed, 1994, Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kegagalan Pasar: Taiwan, Korea Selatan dan Jepang, dalam Bahan Bacaan Ekonomi Politik Pembangunan, Program Studi Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

standart hidup Eropa dalam 25 tahun kemudian. Pertanyaan utama dari tesis ini adalah mengapa negara seperti Jepang bisa sukses secara luar biasa disaat negara-negara lain gagal? Tesis Bank Dunia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Jepang terutama karena menerapkan kebijakan ekonomi yang pro pasar, yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang cepat dihubungkan dengan kegiatan pemerintah yang terbatas tetapi bersifat efektif dan dengan hati-hati. Berdasarkan pandangan pendekatan pro-pasar, peran pemerintah adalah menjalankan empat fungsi pertumbuhan, yaitu: menjamin investasi yang cukup dalam masyarakat, menyediakan iklim yang kompetitif untuk bisnis swasta, menjaga keterbukaan ekonomi untuk pasar internasional dan mempertahankan stabilitas makroekonomi.⁵ Diluar peran ini, pemerintah akan lebih mengganggu pasar daripada menguntungkan. Berdasarkan pengamatan yang mendalam atas pengalaman pembangunan ekonomi selama empat decade terakhir, Tesis Bank Dunia 1991 menyimpulkan bahwa pemerintah biasanya akan gagal dalam memperbaiki *performance* ekonominya apabila menggunakan cara atau pendekatan selain yang pro-pasar. Pendekatan pro-pasar menangkap aspek-aspek penting dari kesuksesan Asia Timur. Ekonomi negara-negara ini stabil secara makroekonomi, memiliki tingkat perdagangan internasional yang tinggi dalam GDP, tingkat investasi masyarakat yang tinggi, dan terdapat tingkat kompetisi yang kuat antar perusahaan.

Analisa Kritis Ajit Singh Terhadap Tesis Bank Dunia

Menurut Tesis Bank Dunia, Jepang adalah kasus pembangunan industri yang paling spektakuler dan paling sukses dalam sejarah umat manusia dan Ajit Singh sepakat dengan hal ini. Namun pertanyaan yang paling relevan dalam konteks ini menurut Singh adalah, sejauh mana Jepang mengikuti resep Bank Dunia yaitu melakukan pendekatan pro-pasar dalam pembangunan? Apakah pemerintah Jepang melakukan *intervene reluctantly*, misalnya meninggalkan prioritas harga dan produksi sehingga menjadi lebih ditentukan oleh kekuatan pasar dan menyediakan infrastruktur untuk perusahaan swasta? Seberapa transparan pemerintah mengintervensi industri di Jepang? Untuk mencapai kesuksesan kolosal ekonomi ini, seberapa dekat integrasi ekonomi Jepang dengan ekonomi dunia?

Terdapat banyak sekali bukti, dan ini sangat diterima oleh para ahli bahwa pemerintah di Jepang tidak mengintervensi pasar secara *reluctant*. Sebaliknya, pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat kuat dan agresif terhadap kebijakan industri untuk mengubah situasi ekonomi yang tidak memuaskan yang dihadapi oleh negara tersebut. Landasan dari kebijakan industri disebut kebijakan struktural (*structural policy*) yang mengarahkan pada adaptasi dan pembangunan teknologi industri-industri yang spesifik seperti baja, obat-obatan, mesin-mesin dan industri berat lainnya, yang menjadi vital untuk meningkatkan pertumbuhan, produktivitas dan income perkapita. Peran pemerintah dalam mempromosikan industri-industri ini dan kemudian membawa Jepang menjadi sukses sangatlah krusial, seperti kata ekonom industri Jepang, Prof. Nino (1972): "mengingat AS disebut sebagai negara industri militer yang kompleks... maka Jepang bisa disebut sebagai sebuah negara dengan industri pemerintah yang kompleks.

Kebijakan Pemerintah Jepang melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan Internasional (MITI) menetapkan bahwa Industri Jepang adalah industri padat modal dan teknologi, seperti industri baja, pengeboran minyak, petro-chemical, industri mobil, pesawat terbang, industri mesin dalam semua jenis dan elektronik, termasuk komputer. Dari sudut pandang yang statis, kebijakan industri-industri tersebut nampaknya tidak rasional secara ekonomis. Tetapi, dari sudut pandang yang luas, industri-industri ini dimana elastisitas

⁵ The World Bank, 1993, *A World Bank Policy Research Report*, Washington D.C, 1993, hal. 9

pendapatan atas permintaan adalah tinggi, kemajuan teknologi sangat cepat dan peningkatan produktivitas tenaga kerja juga cepat. Ini menjadi jelas bahwa tanpa industri-industri ini akan menjadi sulit bagi Jepang untuk memperkerjakan 100 juta orang dan meningkatkan standar hidup mereka seperti di Eropa dan AS dengan industri-industri ringannya sendiri. Apakah kebijakan Jepang yang memilih industri-industri berat dan bahan kimia ini benar atau salah? Dalam kenyataannya Jepang telah bisa mengkonsentrasikan modalnya yang sedikit dalam industri-industri yang strategis. (OECD, 1972)

Pemerintah Jepang menggunakan variasi instrumen yang luas untuk membawa transformasi struktur yang sangat luar biasa atas ekonomi Jepang antara 1950 dan 1973, periode dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Menjelang akhir tahap rekonstruksi pascaperang sekitar tahun 1950, banyak industri Jepang mulai mengimpor teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Beberapa teknologi yang sama sekali baru bagi Jepang, misalnya adalah nilon dan ketrampilan penggilingan dalam industri baja.⁶

Dalam tahun 1950-an, pemerintah Jepang membantu industri yang lemah dan yang baru dengan mendorong daya saing internasionalnya.⁷ Sebagai contoh, MITI merumuskan langkah-langkah untuk memajukan industri elektronik dalam tahun 1957, termasuk pinjaman jangka panjang bunga rendah dari Bank Pembangunan Jepang, penyusutan khusus sesuai Peraturan Promosi Rasionalisasi Perusahaan dan izin untuk membentuk kartel dengan maksud rasionalisasi menurut Hukum Anti Monopoli yang direvisi. Kebijakan ini mencapai hasil yang spektakuler dalam memajukan produksi kalkulator elektronik dan instrumen pengolahan otomatisasi.

Pada dasawarsa tahun 1960-an, Jepang memiliki sejumlah peluang besar yang menguntungkan berkaitan dengan penerapan sistem produksi yang responsif, yaitu antara lain dengan penciptaan sektor industri yang unggul. Terdapat tiga karakteristik yang menonjol: (a) intervensi pemerintah yang ditujukan bagi upaya peningkatan kegiatan produksi yang kompetitif, para birokrat berupaya merangkaikan kebijakan proteksi dengan penciptaan daya saing guna menghambat impor (kecuali untuk bahan mentah dan teknologi tinggi) dan mengandalkan struktur pasar yang juga diciptakan pemerintah. (b) intervensi bersifat selektif antar sektor industri, sumbu diskriminasi terletak pada industri yang “mapan” (dalam arti mampu bersaing secara internasional), industri “baru” dan juga jenis industri yang “menguasai hajat hidup orang banyak” (yakni industri yang dalam kaitannya dengan sektor lain dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan) dan (c) intervensi memiliki dampak yang kumulatif. (Hadley 1970)

Kebijakan yang paling penting di sini adalah keuangan bank dan sistem finansial yang bertumpu pada kredit (pemerintah berperan dalam menentukan harga), kontrol import dan proteksi, pembatasan pada keluar masuk perusahaan di pasar domestik (membatasi *Foreign Direct Investment* bagi MNC⁸), kontrol atas pertukaran luar negeri dan import teknologi dari luar negeri (OECD, 1972; Nino 1972; Boltho, 1975; Caver dan Uekusa, 1976; Dore, 1986; Yamamura, 1988) Pemerintah Jepang tidak hanya menggunakan metode-metode intervensi untuk menghimpun sumberdaya-sumberdaya menuju industri yang spesifik, peran pemerintah dalam pembangunan industri negara adalah lebih dalam dan kadang mencampuri. Ini

⁶ Takafusa Nakamura, 1985, *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*, Kementerian Luar Negeri Jepang Tokyo, hal. 83

⁷ Ibid, hal. 86

⁸ Peran MNC di Jepang, Korsel dan Taiwan di dalam perekonomian secara keseluruhan sangatlah kecil, akses mereka ke pasaran domestik telah dibatasi. Melalui perangkat kebijakan tertentu pemerintah mengarahkan ke kegiatan ekspor.

sesungguhnya sangat bertentangan dengan spesifikasi pendekatan pro pasar dari Tesis Bank Dunia.

Beberapa ahli mencatat, Macan Asia Timur yang lain, seperti Korea Selatan dan Taiwan, juga memiliki tujuan dan kebijakan industri yang komperhensif (lihat yang lainnya Johnson, 1987; Amsden, 1989; Wade, 1990). Negara-negara ini telah banyak terpengaruh oleh apa yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Jepang. Jika dibandingkan dengan Jepang, intervensi negara-negara tersebut dalam perekonomiannya lebih jauh.

Perhatian kebijakan industri Korea Selatan adalah:

- Penggunaan kredit jangka panjang dengan bunga rendah membantu perkembangan industri-industri utama.
- Subsidi yang sangat besar dan paksaan ekspor.
- Kontrol yang sangat ketat terhadap investasi multinasional dan kepemilikan atas industri Korea Selatan.
- Kebijakan yang sangat aktif dari negara atas teknologi.
- Promosi negara atas perusahaan-perusahaan konglomerat dalam skala besar, merger pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang spesifik dan pada umumnya negara membatasi kebebasan masuk dan keluarnya *firm*.

Untuk Taiwan, menurut Wade (1990) kebijakan industrinya adalah mengarahkan dengan sengaja ke ekonomi pasar. Ini tentu saja bukan sebuah gambaran dari intervensi negara yang *reluctant* atau sebagai penjaga malam saja. Sampai awal 1980-an, Korea Selatan dan Taiwan telah menasionalisasi bank dan di kedua negara pemerintah menyalurkan kredit pada sector-sektor yang menyokong perusahaan-perusahaan yang penting sebagai pelengkap perencanaan pembangunan ekonomi.

Kesimpulannya, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan masing-masing melakukan segala hal yang tidak diharapkan untuk dilakukan oleh pendekatan pro-pasar dalam pembangunan. Ketiga negara ini mengikuti sebuah strategi industri yaitu serangkaian kebijakan untuk mengubah dengan sengaja harga-harga pasar dan prioritas-prioritas produksi, yang secara eksplisit dikesampingkan oleh pendekatan pro pasar.

Negara dan Promosi Menuju Keterbukaan Ekonomi

Tesis Bank Dunia menonjolkan peran keterbukaan, kompetisi eksternal dan integrasi yang lebih dekat dengan ekonomi dunia dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Singh ini tidak dapat diuji baik dalam tataran teoritis maupun empiris, terutama dari pengalaman negara-negara Asia Timur yang diangkat sebagai model-model pembangunan yang sukses. Negara-negara Asia Timur telah mencari sebuah strategi tetapi bukan sebuah integrasi yang 'dekat' dengan ekonomi global. Mereka berintegrasi sejauh titik dimana itu bermanfaat bagi mereka dalam melakukan promosi pertumbuhan ekonomi nasional mereka. Singh mengawalinya dengan sebuah paradigma teoritis alternatif yang respek pada hubungan antara keterbukaan, integrasi ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Ini akan membantu menyediakan sebuah analisis rasional untuk integrasi strategis yang dikejar oleh Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Dapat disimpulkan bahwa pengalaman Jepang kontradiktif dengan penjelasan tesis bahwa semakin terbuka ekonomi, semakin dekat integrasi dengan ekonomi global, maka tingkat pertumbuhan akan semakin cepat.

Pemerintah dan Kompetisi Dalam Pasar Domestik

Bertentangan dengan analisa tesis tentang keunggulan mobilitas kapital, tenaga kerja maupun perusahaan untuk keluar masuk dan pentingnya kompetisi didalam pasar-pasar domestik, kesuksesan negara-negara Asia Timur menjadi agak berbeda. Pemerintah dari

negara-negara ini mengatur atau memandu kompetisi dalam pasar domestik dengan sikap dan maksud tertentu, yaitu dengan melemahkan bahkan membatasi dalam beberapa hal.

Lebih penting lagi, pemerintah Jepang memandang Hukum Anti-trust sebagai bagian dan bidang strategi industrinya secara keseluruhan. Seperti Magaziner dan Hout (1980) menunjukkan, dalam industri yang masih muda, selama fase pembangunan, pemerintah melemahkan kompetisi. Ketika industri-industri ini menjadi matang secara teknologi, kompetisi diijinkan untuk tumbuh dengan subur. Kemudian ketika industri mengalami kemunduran dalam kompetitif, pemerintah melemahkan lagi kompetisi dan berusaha untuk menghasilkan sebuah aturan rasionalisasi industri. **Magaziner dan Hout** mengamati bahwa kekuatan terbesar MITI nampak pada caranya untuk memahami tahapan kompetitif melalui mana sebuah industri berkembang dan kemampuannya untuk menyediakan kebijakan yang sesuai. Yamamura(1988) menunjukkan manfaat dari model kebijakan industri Jepang dan peran kompetisi didalamnya. Pemerintah secara esensial mengatur "perlombaan investasi" diantara perusahaan oligopoly besar yang berpengaruh yang mengekspor dan menjadi bagian pasar dunia sebagai tujuan yang signifikan. Seperti di dunia nyata, pasar-pasar selalu tidak lengkap, dan banyak persaingan tanpa koordinator (tanpa ada yang mengatur) akan membawa kehancuran pada kompetisi, perang harga dan kelebihan kapasitas, menjadi factor penghambat dorongan/rangsangan untuk berinvestasi. Dalam keajaiban perekonomian Jepang, MITI menunjukkan peran koordinatornya yang krusial dan menyusun kombinasi yang dinamis antara kerjasama dan kompetisi yang mencirikan kebijakan industri Jepang.

Singh juga mencatat bahwa Korea Selatan juga tidak mengikuti sebuah kebijakan kompetisi domestik secara maksimum atau pasar bebas. Pemerintah Korea Selatan, selangkah lebih maju daripada Jepang yang secara active membantu menciptakan konglomerat besar, menaikkan merger dan keluarnya firm. Ini juga membantu untuk mengatur tingkat investasi diantara konglomerat besar Korea mendekati batas Jepang. Ini kadang menunjukkan/membantah bahwa kekuatan kompetisi pasar telah memainkan peran yang lebih besar di ekonomi domestik Taiwan, tetapi Singh mencatat bahwa Taiwan dan Korea Selatan memiliki beberapa konsentrasi struktur industri yang paling tinggi diantara negara-negara ekonomi pasar.

Kesimpulan

Tulisan ini telah membahas tentang pelajaran yang digambarkan dari pengalaman Jepang, Korea Selatan dan Taiwan – negara-negara yang menurut Tesis Bank Dunia dijadikan sebagai model pembangunan yang sukses – bahwa ternyata mereka tidak netral, negara tidak melakukan pendekatan yang pro-pasar untuk pembangunan. Ketiga negara tersebut juga tidak mempraktikkan sebuah integrasi yang menyatu dengan ekonomi dunia selama periode pertumbuhan cepat mereka. Negara memainkan peran yang besar dan mengikuti kebijakan industri yang sangat aktif. Pemerintah tidak menggantikan pasar secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Uni Soviet, tidak juga hanya mengikuti pasar. Malahan, dengan gambaran MITI Jepang⁹ sebagai sebuah perencana yang berorientasi pasar, pemerintah memandu pasar melalui perubahan structural yang terencana. Lebih dari itu, ketiga negara Asia Timur berintegrasi dengan ekonomi dunia dengan caranya sendiri dan mendapatkan manfaat dari sikapnya tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah: Dapatkah pengalaman negara-negara Asia Timur diterapkan oleh negara-negara lain? Menurut Singh, tidak dalam semua hal tetapi dalam

⁹ Di Korea Selatan adalah Badan Perencanaan Ekonomi dan di Taiwan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi – Badan Pengembangan Industri

beberapa hal yang penting, tidak disemua tempat tetapi di negara-negara semi industri seperti China, India, Mexico dan Brazil. Sebagai contoh, Singh percaya bahwa beberapa pengalaman diatas dapat dipelajari dan diimplementasikan di India selama berbagai fase pemerintahan yang kuat dalam 40 tahun terakhir. Namun Singh mengajukan "prasyarat" agar India bisa seperti Jepang, yaitu:

Melakukan substitusi import dengan memajukan eksport. Ini akan memberi kesempatan bagi India untuk mencapai sukses dalam menuju angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Sikap elit yang berkuasa terhadap import teknologi dan pembangunan teknologi. Negara berusaha untuk menemukan jalannya sendiri. Agar tidak terjadi proses pemborosan, India seharusnya meminjam teknologi, seperti Jepang dan negara lain yang terlambat dalam melakukan industrialisasi.

Dengan kata lain, poin pentingnya bukan kebijakan MITI yang tidak dapat diimplementasikan tetapi karena negara, dalam hal ini India, kurang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apa yang membedakan antara kebijakan industri Jepang, Korea Selatan dan Taiwan dari negara-negara yang lain, baik yang sudah maju maupun yang sedang membangun, adalah kemampuan dari negara-negara tadi untuk tidak hanya menggunakan *carrots* (insentif, subsidi dll) tapi juga *sticks* (hukuman) untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah dalam negara-negara Asia Timur ini lebih banyak memiliki kekuatan dan apa yang disebut ilmuwan politik sebagai otonomi yang lebih besar daripada pelaku-pelaku ekonomi yang lain (lihat lebih jauh Amsden, 1989; Wade, 1990; Fishlow, 1990).

Kelemahan yang mendasar dari pendekatan pro-pasar dari Tesis Bank Dunia, yang termasuk dalam ekonomi pembangunan neo-klasik, adalah kurangnya perhatian terhadap gagasan bahwa pemerintah mempunyai perbedaan *kapasitas* dalam menuntun jalannya mekanisme pasar.

Daftar Pustaka

- Ajit Singh, *State Intervention and the 'Market-Friendly' Approach to Development: A Critical Analysis of the World Bank Theses*.
A World Bank Policy Research Report, The East Asian Miracle, The World Bank, Washington D.C, 1993
- Mohtar Mas'ood, 1994, *Bahan Bacaan Ekonomi Politik Pembangunan*, Program Studi Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Takafusa Nakamura, 1985, *Perkembangan Ekonomi Jepang Modern*, Kementrian Luar Negeri Jepang